

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Partisipasi politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang mencerminkan keterlibatan aktif warga negara dalam menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan pemerintah. Secara global, tren partisipasi politik menunjukkan adanya dinamika yang signifikan akibat kemajuan teknologi digital, perubahan perilaku generasi muda, serta meningkatnya kesadaran terhadap hak-hak politik (Almadhea et al., 2024). Transformasi digital telah membuka ruang baru bagi partisipasi politik, mulai dari kampanye daring, mobilisasi massa melalui media sosial, hingga diskusi kebijakan publik yang lebih inklusif, yang menciptakan paradigma baru dalam konsep demokrasi digital (*digital democracy*) (Amin et al., 2023). Di Asia Tenggara, negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia menjadi contoh menarik karena keduanya mengadopsi sistem demokrasi elektoral dengan karakteristik sosial, budaya, dan kelembagaan yang berbeda, namun sama-sama menghadapi tantangan dalam mewujudkan partisipasi politik yang substantif dan bermakna (Suryanagara et al., 2025).

Tabel 1. 1
Partisipasi Politik Warga Indonesia dan Malaysia

Tahun	Negara	Jenis Pemilu	Persentase Partisipasi
2022	Malaysia	Pemilu Umum (Dewan Rakyat / legislatif)	73,29%
2024	Indonesia	Pemilu Legislatif (DPR RI)	81,42%

Sumber: Election Commission of Malaysia (2022); Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (2024).

Tabel di atas menggambarkan perbandingan tingkat partisipasi politik masyarakat Malaysia dan Indonesia dalam sejumlah pemilihan umum legislatif yang berlangsung antara tahun 2022 dan 2024. Tingkat partisipasi pemilih di Indonesia pada Pemilu Legislatif 2024 mencapai 81,42 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan 73,29 persen di Malaysia pada Pemilu 2022. Perbedaan ini menunjukkan tingkat keterlibatan politik warga negara yang bervariasi di kedua negara, meskipun wilayah dan tradisi demokrasi elektoral mereka relatif serupa. Tingginya partisipasi pemilih di Indonesia dapat dikaitkan dengan sistem multipartai yang kompetitif dan mekanisme perwakilan proporsional terbuka, yang mendorong mobilisasi pemilih yang lebih intensif oleh kedua partai dan kandidat. Sebaliknya, rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Malaysia mencerminkan dinamika politik yang berbeda, terutama dipengaruhi oleh sistem Pemilu first-past-the-post dan perubahan dalam lanskap politik nasional setelah krisis pemerintahan berakhir dalam beberapa tahun.

Secara global, pandemi COVID-19 turut memengaruhi dinamika pemilu di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Malaysia, dengan memaksa penyelenggara pemilu untuk beradaptasi terhadap protokol kesehatan dan keterbatasan mobilitas fisik. Beberapa tahapan pemilihan umum harus ditunda atau disesuaikan untuk menjaga keselamatan publik tanpa mengorbankan prinsip demokrasi, seperti pelaksanaan kampanye virtual, pembatasan jumlah peserta dalam acara politik, dan pengaturan waktu pemungutan suara yang lebih fleksibel dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau pemilih yang terisolasi. Studi oleh Redhani & Ridwan mengungkapkan bahwa Indonesia dan

Malaysia mengambil pendekatan berbeda dalam menanggapi krisis, dengan Indonesia tetap melaksanakan Pilkada serentak 2020 meskipun menghadapi risiko kesehatan publik dan dilema antara hak demokrasi dengan keselamatan warga, sementara Malaysia menerapkan keadaan darurat politik yang menunda pemilu dan memicu perdebatan mengenai legitimasi demokrasi dan penyalahgunaan kekuasaan eksekutif yang berpotensi melemahkan prinsip akuntabilitas pemerintahan (Redhani et al., 2025).

Meskipun kedua negara menunjukkan komitmen terhadap demokrasi elektoral, perbedaan sistem politik, budaya politik, dan struktur pemerintahan menghasilkan variasi tingkat partisipasi warga yang signifikan. Indonesia memiliki sistem multipartai dengan desentralisasi tinggi yang memungkinkan variasi partisipasi di tingkat lokal, memberikan ruang bagi kepala daerah dan aktor politik lokal untuk mengembangkan strategi mobilisasi yang lebih kontekstual dan berbasis kearifan lokal, meskipun hal ini juga rentan terhadap praktik politik uang dan patronase serta menciptakan ketimpangan dalam distribusi (Hadiz, 2010; Sulaiman et al., 2025). Perbedaan sistem pemilihan legislatif antara Indonesia yang menganut proporsional terbuka dan Malaysia yang menerapkan sistem first-past-the-post juga menciptakan dinamika mobilisasi pemilih yang berbeda dan memengaruhi pola representasi politik (Nugroho et al., 2024). Sedangkan Malaysia masih dipengaruhi oleh sentralisasi kekuasaan dan politik patronase yang kuat, terutama melalui sistem persekutuan yang menempatkan pemerintah federal sebagai pemegang otoritas utama, sehingga

partisipasi politik nasional serta loyalitas etnis dan agama yang membentuk politik identitas yang kompleks (Prasad, 2015).

Permasalahan utama yang muncul adalah kesenjangan antara kesadaran politik warga dan efektivitas representasi politik yang dihasilkan dari pemilu. Dalam banyak kasus, partisipasi formal melalui pemilu selalu berbanding lurus dengan partisipasi substantif dalam proses pengambilan kebijakan publik, di mana warga seringkali merasa suara mereka tidak didengar setelah pemilu selesai, dan mekanisme akuntabilitas politik masih lemah sehingga menimbulkan gap antara harapan pemilih dan kinerja wakil rakyat (Nurchahyo, 2025). Fenomena ini memunculkan apatisme politik, ketidakpercayaan terhadap elite politik, dan menurunnya legitimasi sistem demokrasi itu sendiri, yang pada gilirannya dapat mengancam stabilitas politik dan kohesi sosial dalam jangka panjang, bahkan berpotensi memicu gerakan sosial digital sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan kolektif generasi milenial terhadap sistem politik konvensional (Anwar & Fauzianty, 2025).

Bertolak dari uraian tersebut, penelitian ini beranggapan bahwa perbedaan mendasar antara sistem politik dan sistem pemilu di Indonesia dan Malaysia turut membentuk pola partisipasi politik yang berbeda di kedua negara. Sistem multipartai dengan tingkat desentralisasi yang tinggi, dipadukan dengan mekanisme proporsional terbuka di Indonesia, cenderung mendorong partisipasi politik yang lebih kompetitif dan berbasis mobilisasi lokal, meskipun di sisi lain rentan terhadap praktik politik uang dan patronase. Sebaliknya, sistem *first-past-the-post* yang diterapkan Malaysia, yang diperkuat oleh sentralisasi kekuasaan

serta kuatnya politik patronase dan identitas etnis-agama, diduga melahirkan pola partisipasi yang lebih terikat pada kelompok loyalitas dan afiliasi komunal daripada preferensi individu. Dengan demikian, perbedaan struktur kelembagaan pemilu tersebut diperkirakan tidak hanya berdampak pada tingkat partisipasi secara kuantitatif, tetapi juga ikut membentuk pola atau corak partisipasi politik yang secara kualitatif berbeda antara kedua negara, baik yang termanifestasi dalam bentuk partisipasi konvensional maupun non-konvensional.

Dalam konteks transformasi demokrasi modern, partisipasi politik masyarakat mengalami perubahan seiring dengan kemajuan teknologi digital, meningkatnya pengaruh media sosial, dan lebih aktifnya generasi muda dalam diskusi politik. Namun, pemahaman tentang bagaimana proses transformasi ini berbeda antara Indonesia dan Malaysia masih belum sepenuhnya jelas, terutama dalam pendekatan komparatif yang mengaitkan dimensi struktural dan kultural secara bersamaan (Norris, 2001; Jalli & Idris, 2023).

Walaupun kajian mengenai partisipasi politik di Indonesia dan Malaysia telah dilakukan secara luas, sebagian besar penelitian masih berfokus pada perilaku pemilih dan faktor kelembagaan formal, tanpa menelaah secara mendalam peran konteks budaya dan dinamika digital dalam membentuk partisipasi warga. Hanya sedikit studi yang mengupas secara komparatif bagaimana perbedaan sosial-budaya, sistem pemilu, serta transformasi demokrasi digital memengaruhi pola dan intensitas keterlibatan politik masyarakat di kedua negara. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menutup celah tersebut dengan mengadopsi pendekatan komparatif yang menyatukan analisis struktural, kultural,

dan digital dalam memahami wajah partisipasi politik modern di Indonesia dan Malaysia.

Kontribusi baru di penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan dimensi struktural (sistem politik dan kebijakan publik) dengan dimensi kultural (nilai-nilai kewargaan dan identitas politik), sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih utuh tentang dinamika partisipasi politik di Asia Tenggara dengan menggunakan lensa multikulturalisme dan politik identitas (Prasad, 2015). Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi mekanisme kasual yang menghubungkan kebijakan institusional dengan *outcome* partisipasi politik, serta mengeksplorasi bagaimana agensi individu dan kolektif berinteraksi dengan struktur politik dalam membentuk pola-pola partisipasi yang beragam, baik yang bersifat konvensional (seperti pemilu) maupun non—konvensional (seperti protes, advokasi, dan aktivisme digital), dengan mempertimbangkan pengaruh propaganda digital dan misinformasi yang semakin masif di kedua negara (Jalli & Idris, 2023). Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi perspektif pembangunan sebagai kebebasan (Sen, 2014) untuk menganalisis bagaimana partisipasi politik tidak hanya sebagai hak prosedural tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan substantif yang berkontribusi pada kesejahteraan dan martabat warga negara.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komparatif partisipasi politik warga dalam pemilihan umum di Indonesia dan Malaysia melalui pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, dengan fokus pada konteks sosial, budaya, dan kelembagaan yang membentuk pola partisipasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat partisipasi politik di

kedua negara untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang kontekstual dan berbasis bukti.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya studi literatur ilmu politik komparatif, khususnya mengenai hubungan antara struktur politik dan partisipasi warga di negara berkembang demokratis, serta memberikan kontribusi pada pengembangan teori partisipasi politik yang lebih sensitif terhadap konteks regional dan kultural Asia Tenggara dengan mengintegrasikan teori klasik tentang budaya sipil (*civil culture*) dan teori kontemporer tentang demokrasi digital. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi lembaga penyelenggara pemilu dan pembuat kebijakan dalam merancang strategi peningkatan partisipasi politik yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk pengembangan program pendidikan pemilih yang lebih efektif, reformasi sistem pemilu yang lebih responsif terhadap kebutuhan pemilihan muda, penguatan transparansi dan akuntabilitas pendanaan politik, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses dan kualitas partisipasi politik dengan tetap mewaspadaikan risiko propaganda digital dan polarisasi online.

Dengan demikian, penelitian berjudul **“Studi Komparatif Partisipasi Politik Warga Dalam Pemilu Legislatif Antara Malaysia Dan Indonesia (2022-2024)”** dapat menjadi dasar bagi pengembangan teori partisipasi politik dalam konteks Asia Tenggara yang multikultural, sekaligus memperkuat kesadaran bahwa demokrasi bukan hanya soal hak memilih, tetapi juga bertanggung jawab kolektif warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik melalui berbagai mekanisme, baik formal maupun informal,

untuk memastikan bahwa suara mereka didengar, kepentingan mereka terwakili, dan kebijakan publik yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat serta berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan sejahtera. Dengan memahami dinamika partisipasi politik melalui lensa komparatif Indonesia-Malaysia, penelitian ini juga berkontribusi pada diskursus global tentang bagaimana demokrasi dapat diperkuat di negara-negara berkembang dengan keberagaman sosial-kultural yang tinggi, serta bagaimana teknologi digital dapat dimanfaatkan sebagai enabler demokrasi partisipatif tanpa mengorbankan deliberasi yang berkualitas dan inklusivitas politik yang substantif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dideskripsikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik partisipasi politik warga dalam pemilu legislatif di Malaysia dan Indonesia yang dipahami dalam konteks kesadaran politik dan perilaku politik?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tingkat partisipasi politik di kedua negara tersebut?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengenali dan memahami ciri-ciri cara warga berpartisipasi dalam politik dalam pemilu legislatif di Malaysia dan Indonesia, termasuk perilaku pemilih dan kesadaran politik.

2. Untuk eksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik, seperti faktor struktural dan kultural.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan fokus penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan memahami makna partisipasi politik warga dalam konteks sosial dan budaya politik di Indonesia dan Malaysia.
2. Membandingkan faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi perbedaan pola partisipasi politik antara Indonesia dan Malaysia.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat besar bagi perkembangan ilmu politik, terutama dalam mempelajari partisipasi politik dan perbandingan sistem demokrasi di Asia Tenggara. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam memperkuat teori partisipasi politik, terutama teori budaya politik yang dikemukakan oleh Almond & Verba (1963), teori demokrasi poliarki Robert Dahl (1989) yang menekankan partisipasi sebagai indikator kualitas demokrasi, serta teori demokrasi komparatif Lijphart (1971) tentang sistem konsensus dan mayoritarian. Pendekatan ini tidak hanya melihat angka partisipasi pemilih secara numerik, tetapi juga memahami makna sosial, motivasi tindakan, orientasi politik, serta faktor-faktor struktural dan

budaya yang membentuk partisipasi politik dalam konteks demokrasi elektoral di Asia Tenggara, yang sedang mengalami perubahan dan pengukuhan demokrasi.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak. Bagi pemerintah dan lembaga pemilu seperti KPU Indonesia dan SPR Malaysia, diharapkan dapat menjadi masukan untuk meningkatkan partisipasi warga dengan kebijakan yang lebih inklusif dan transparan. Untuk partai politik dan organisasi masyarakat sipil, penelitian ini menekankan pentingnya pendidikan politik berkelanjutan dan mobilisasi warga yang etis. Bagi masyarakat, terutama generasi muda, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi aktif dalam demokrasi. Terakhir, bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi perbandingan di bidang partisipasi politik dan hubungan antara institusi demokrasi dan masyarakat sipil.